



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM.8 Tahun 2006

TENTANG

**RENCANA INDUK BANDARA KHUSUS DAN LANDASAN KHUSUS
HELIKOPTER DI AREA LNG TANGGUH
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI, PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Pasal 38 ayat (3) tentang Kebandarudaraan, telah diatur ketentuan mengenai izin pembangunan bandar udara khusus diberikan setelah memenuhi persyaratan antara lain memiliki penetapan lokasi dan rencana induk bandar udara;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a di atas, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 283 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Khusus dan Landasan Khusus Di Areal LNG Tangguh Di Kabupaten Teluk Bintuni, Propinsi Irian Jaya Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Bandara Khusus Helokopter Di Area Tangguh Di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Irian Jaya Barat;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T 11./2'4-U tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Gubernur Irian Jaya Barat Nomor : 821.2/762/GIJB/2005 Tanggal 30 September 2005 Perihal Lokasi Bandar Udara Khusus di Tanah Merah Bintuni;
 2. Surat Rekomendasi Bupati Manokwari Nomor 133 / 1 144 Tanggal 16 Oktober 2001 Perihal Persetujuan Lokasi Tangguh yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RENCANA INDUK BANDARA KHUSUS DAN LANDASAN KHUSUS HELIKOPTER DI AREA LNG TANGGUH DI KABUPATEN TELUK BINTUNI, PROVINSI IRIAN JAYA BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Bandar udara khusus adalah Bandar Udara Khusus Tangguh LNG yang berlokasi di Desa Saengga Tanah Merah, Kecamatan Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Irian Jaya Barat yang penggunaannya hanya untuk menunjang kegiatan tertentu dan tidak dipergunakan untuk umum;
2. Rencana Induk Bandar Udara Khusus untuk selanjutnya disebut rencana induk adalah pedoman pembangunan dan pengembangan bandar udara khusus yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan tanah serta ruang udara untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya;
3. Rancangan Awal adalah proses lanjut dari Rencana Induk yang mencakup rancangan tata letak bandar udara yang bersifat teknis dan konseptual, perpetakan setiap fungsi tanah, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarananya;
4. Rancangan Teknis Terinci adalah penjabaran secara rinci dari rancangan awal sebagai dasar kegiatan pembangunan bandar udara yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahan;
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II KEBUTUHAN DAN BATAS - BATAS LAHAN

Pasal 2

- (1). Untuk menyelenggarakan kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusaha serta pengembangan bandar udara khusus sesuai Rencana Induk, dibutuhkan lahan seluas kurang lebih 141 Ha.

- (2). Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara khusus yang posisinya ditentukan terhadap titik referensi sistim koordinat bandar udara khusus (perpotongan sumbu X dan sumbu Y) yang terletak pada koordinat geografis $02^{\circ} 26' 45,41''$ Lintang Selatan dan $133^{\circ} 09' 17,03''$ Bujur Timur atau pada Koordinat Bandar Udara Khusus $X = 20.000$ meter dan $Y = 20.000$ meter, dimana sumbu X berimpit dengan sumbu landasan yang mempunyai azimuth $159^{\circ} 59' 55,84''$ geografis dan sumbu Y melalui ujung landasan 16 tegak lurus sumbu X.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan luas lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 2 tercantum pada Lampiran I A.
- (2) Batasan Kebutuhan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada Lampiran I B.

Pasal 4

Lokasi dan batas kebutuhan lahan untuk penempatan sarana alat bantu navigasi penerbangan yang terletak di luar batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 5

- (i). Rencana pembangunan fasilitas bandar udara khusus untuk memenuhi kebutuhan operasi penerbangan dan pelayanan bandar udara dilakukan terutama berdasarkan kebutuhan jasa angkutan udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A.
- (2). Fasilitas bandar udara khusus yang direncanakan untuk dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II B.
- (3). Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau kembali oleh Penyelenggara Bandar Udara Khusus Tangguh LNG setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 6

Pembangunan fasilitas bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib didahului dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Pasal 7

Rancangan awal dan rancangan teknik terinci untuk pelaksanaan pembangunan fasilitas bandar udara khusus disahkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 8

- (1). Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusahaan serta pembangunan dan pengembangan bandar udara khusus tercantum dalam lampiran II B.
- (2). Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dan belum diatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Direktur Jenderal.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berlaku untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 11

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 1 FEBRUARI 2003

MENTERI PERHUBUNGAN

ttid

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Hukum dan HAM;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
10. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
11. Bupati Teluk Bintuni – Provinsi Irian Jaya Barat;
12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Irian Jaya Barat.

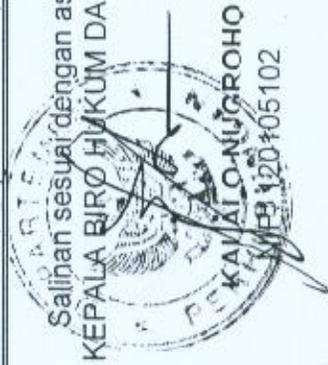
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



Lampiran : I.B
 Peraturan Menteri Perhubungan
 Nomor : K/18 TAHUN 2006
 Tanggal : 1 FEBRUARI 2006

**DAFTAR SISTIM KOORDINAT BATAS KEBUTUHAN LAHAN BANDAR UDARA KHUSUS TANGGUH LNG
 DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

| TITIK | SISTIM KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS) | | SISTIM KOORDINAT DENGAN REFERENSI ELLIPSOID WGS - 84 (ID -95) | | KOORDINAT GEOGRAFIS | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|---|---------------|---------------------|---------|-------|-----|-----------------|-------|-------------|---|
| | X | | Y | | X | | Y | | LINTANG SELATAN | | BUJUR TIMUR | |
| | (meter) | (meter) | (meter) | (meter) | (meter) | (meter) | ° | ' | " | ° | ' | " |
| TH-16 | 20.000,000 | 20.000,000 | 294.817,967 | 9.729.506,765 | 2 | 26 | 45,41 | 133 | 9 | 17,03 | | |
| TH-34 | 21.300,000 | 20.000,000 | 295.262,618 | 9.728.285,173 | 2 | 27 | 25,19 | 133 | 9 | 31,37 | | |
| A1 | 19.525,235 | 19.962,988 | 294.620,798 | 9.729.940,235 | 2 | 26 | 31,29 | 133 | 9 | 10,67 | | |
| A2 | 19.525,242 | 20.314,496 | 294.951,108 | 9.730.060,458 | 2 | 26 | 27,39 | 133 | 9 | 21,36 | | |
| A2.1 | 19.525,242 | 20.414,494 | 295.045,075 | 9.730.094,659 | 2 | 26 | 25,12 | 133 | 9 | 24,40 | | |
| A2.2 | 21.864,800 | 20.414,494 | 295.845,752 | 9.727.896,191 | 2 | 27 | 43,77 | 133 | 9 | 35,99 | | |
| A3 | 21.864,803 | 20.314,447 | 295.751,285 | 9.727.861,990 | 2 | 27 | 38,99 | 133 | 9 | 47,16 | | |
| A4 | 21.864,796 | 19.983,879 | 295.440,652 | 9.727.748,929 | 2 | 27 | 42,66 | 133 | 9 | 37,11 | | |
| A5 | 21.460,011 | 19.983,888 | 295.302,208 | 9.728.129,302 | 2 | 27 | 30,27 | 133 | 9 | 32,64 | | |
| A6 | 21.460,041 | 19.800,000 | 295.129,422 | 9.728.066,377 | 2 | 27 | 32,31 | 133 | 9 | 27,05 | | |
| A7 | 21.053,333 | 19.800,000 | 294.990,311 | 9.728.448,555 | 2 | 27 | 19,86 | 133 | 9 | 22,56 | | |
| A8 | 20.939,917 | 19.615,807 | 294.778,435 | 9.728.492,129 | 2 | 27 | 18,43 | 133 | 9 | 15,71 | | |
| A9 | 20.474,052 | 19.615,750 | 294.619,037 | 9.728.929,876 | 2 | 27 | 04,18 | 133 | 9 | 10,57 | | |
| A10 | 20.474,030 | 19.800,000 | 294.792,167 | 9.728.992,918 | 2 | 27 | 02,13 | 133 | 9 | 16,17 | | |
| A11 | 19.840,041 | 19.800,000 | 294.575,317 | 9.729.588,668 | 2 | 26 | 42,73 | 133 | 9 | 09,18 | | |
| A12 | 19.840,019 | 19.962,982 | 294.728,462 | 9.729.644,435 | 2 | 26 | 40,92 | 133 | 9 | 14,14 | | |

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN


MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

Lampiran : II. A
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : KM 8 TAHUN 2006
Tanggal : 1 FEBRUARI 2006

KEBUTUHAN JASA ANGKUTAN UDARA
BANDAR UDARA KHUSUS TANGGUH LNG,
KABUPATEN TELUK BINTUNI, PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

| No. | URAIAN | KEBUTUHAN | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------|------------------|
| I | PENUMPANG (Per Tahun) - Internasional - Domestik - Total | - 14.520 14.520 | Chartered flight |
| II | PERGERAKAN PESAWAT (Per Tahun) - Internasional - Domestik - Total | - 276 276 | |
| III | Jam Sibuk Penumpang - Internasional - Domestik - Total | - 50 50 | |
| IV | Jam Sibuk Pesawat - Internasional - Domestik - Total | - 2 2 | |
| V | Kargo (ton / hr) | 12 | |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

Lampiran : II. B

Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : KM 8 TAHUN 2006

Tanggal : 1 FEBRUARI 2006

**RENCANA PENGEMBANGAN
FASILITAS BANDAR UDARA KHUSUS DI TANGGUH – KABUPATEN TELUK BINTUNI
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

| NO. | URAIAN | KEBUTUHAN | KETERANGAN |
|-----|--|--|----------------|
| I | FASILITAS SISI UDARA KLASIFIKASI LANDAS PACU | Non Instrument, 3C | |
| | - Pesawat terbesar | DHC - 8 | |
| | - Landas pacu (Runway) | C - 130H 1.300 x 30 | m |
| | - Strip landasan pacu (Runway Strip) | 1.420 x 150 | m |
| | - Penghubung Landas Pacu (Taxiway) | 170 x 18 | m |
| | - Tempat parkir pesawat (Apron) | | |
| | Kapasitas parkir pesawat : | | |
| | - C - 130 H | 1 | pesawat |
| | - DHC - 8 | 1 | pesawat |
| | - S - 61 | 2 | helikopter |
| | Total | 2 | pesawat |
| | | 2 | helikopter |
| II | FASILITAS SISI DARAT | | |
| | - Bangunan Terminal Penumpang & Menara pengawas Lalu Lintas Udara | 3.318 | m ² |
| | - DPPU | 2.567 | m ² |
| | - Bangunan PKP-PK | 300 | m ² |
| | - Tempat Parkir Kendaraan : | | |
| | Luas | 1.250 | m ² |
| | Kapasitas | 42 | kendaraan |
| | - Bangunan Administrasi / Operasi | - | - |
| | - Bangunan Meteorologi / Radar | 18 | m ² |
| | - Bangunan pemeliharaan bandar udara (Hanggar) | 4.662 | m ² |
| | - Pos Penjagaan | 20 | m ² |
| III | FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN | VOR / DME | |
| IV | ALAT BANTU Pendaratan VISUAL | PAPI Runway Lighting Taxiway Lighting Threshold Lighting Runway End Lighting Apron Lighting Apron Flood Lighting Helipad Lighting | |
| V | FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN | VHF Air to Ground - Com HF Ground to Air Com HF Ground to Ground TX / RX | |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO TEKNIK DAN KSLN



MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA